



NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI
PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. KARO

NOMOR : 91/ERS/HUIC-KAM/2019

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

TANGGAL
SUK : 04-03-19

TANDA TANGAN
KABAG : *Mesril*

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2019

26-03-19 KASUBBAG :

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang... *l*

REG NO : 1266	AD/SEK
TGL : 27/3/19	PPR : <i>kl</i>
REG NO : <i>1266</i>	WAK. WKL
TGL : <i>27/3/19</i>	VPM
REG NO : <i>1266</i>	ROD/SPT
TGL : <i>27/3/19</i>	PPR

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ✓
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154); ✓
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); ✓
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); ✓
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03); ✓

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN: ✓

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA, DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM ✓
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karo melalui Sekretaris Daerah. ✓

6. Kecamatan... ✓

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
19. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa;

20. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan;
21. Tunjangan BPD adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulan.

BAB II
PENETAPAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Maksud penetapan rincian ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memberikan ADD Dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Tujuan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. menambah pendapatan Desa;
- b. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara artisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. pengelolaan... *l*

- a. pengelolaan keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 81.819.589.100,00 (delapan puluh satu milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) Untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) Desa di Kabupaten Karo.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 10% (sepuluh persen) Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD dan;
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

- (1) Besaran ADD Kabupaten dihitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{ADD \ Kab = 10\% \times (DP-DAK)}$$

Keterangan	:
ADD Kab	: Alokasi Dana Desa Kabupaten
DP	: Dana Perimbangan
DAK	: Dana Alokasi Khusus

- (2) ADD terdiri dari ADD Merata sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan ADD Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh perseratus).

$$\boxed{ADD = ADDM + ADDP}$$

Keterangan	:
ADD	: ADD yang diberikan kepada setiap Desa;
ADDM	: ADD yang diberikan secara merata kepada setiap Desa;
ADDP	: ADD yang diberikan secara proporsional sesuai Bobot Variabel.

(3) Besaran... *M G*

- (3) Besaran ADD Merata yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDM} = 60\% \text{ ADD Kab} - \text{Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa}$$

Keterangan :

ADDM : ADD Merata

ADD Kab : ADD yang dialokasikan kabupaten

- (4) Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDpx} = \text{BDx} \times \text{ADDP}$$

Keterangan :

ADDpx : ADD yang diberikan kepada Desa X secara proporsional;

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x;

ADDP : ADD Proporsional.

Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. angka kemiskinan; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a.	jumlah penduduk	KV1	0,4
b.	luas wilayah Desa	KV2	0,3
c.	angka kemiskinan	KV3	0,2
d.	Tingkat kesulitan geografis	KV4	0,1

- (4) Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BDx} = ((0,4 \times \text{KV1}x) + (0,3 \times \text{KV2}x) + (0,2 \times \text{KV3}x) + (0,1 \times \text{KV4}x))$$

Keterangan :

a. BDx : nilai bobot Desa untuk Desa x;

b. KV1x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;

c. KV2x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;

d. KV3x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x;

e. KV4x : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x.

BAB V
PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ✓
Pasal 9

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 5.346.089.304,00 (lima miliyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) Desa di Kabupaten Karo.
- (3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

$$DBH = DBHM + DBHP$$

Keterangan :	
DBH	: Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
DBHM	: Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata
DBHP	: Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

- (4) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan rumusan :

$$DBHPx = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa } X}{\text{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa}} \times 100\%$$

Keterangan :	
DBHPx	: Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional yang diberikan kepada Desa x

BAB VI
 PENGGUNAAN ✓
 Pasal 10

- (1) Kegiatan yang didanai oleh ADD Dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Penggunaan ADD Dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APB Desa yang digunakan dengan ketentuan:

a.paling... ✓

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa; dan
 3. tunjangan dan operasional BPD.
 4. jaminan sosial bagi Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. penyediaan sistem informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (2) Penggunaan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
 - e. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Penggunaan untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- (4) Penggunaan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan... N C

- b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat desa dan BPD; dan
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat.
 - e. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah.
- (5) Penggunaan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 12

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten Kabupaten Karo Tahun 2019 dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD;
 - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta.

Pasal 13

Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan
Kepala Desa dan Perangkat Desa

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian.
- (3) Iuran jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,24% untuk jaminan kecelakaan dan 0,30% untuk jaminan kematian dari Besaran Upah Minimum Kabupaten Karo Tahun 2019.
- (4) Iuran jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada ADD.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dapat melaksanakan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan benar.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan; atau
 - b. stimulant
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

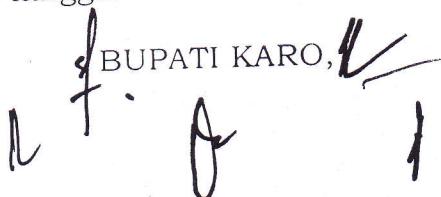
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal

2019

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal

2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 14

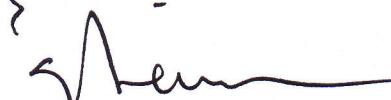
- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dapat melaksanakan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan benar.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan; atau
 - b. stimulant
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

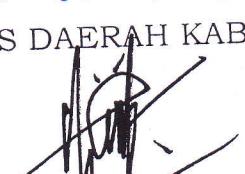
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 APRIL 2019

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 APRIL 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 08

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 14

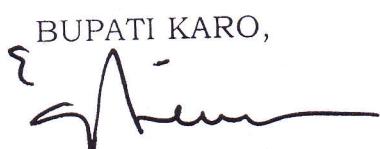
- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dapat melaksanakan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan benar.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan; atau
 - b. stimulant
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

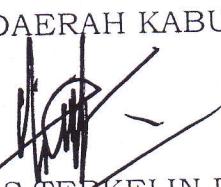
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2019

BUPATI KARO,


TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				ADD	TOTAL DANA
		KADES	SEKDES (NON PNS)	KAUR (SESUAI TIPE DESA)	KASI (SESUAI TIPE DESA)	JUMLAH	KETUA	WAKIL	SEKRE - TARIS	ANGGOTA		
1	Kaban	24.000.000	-	24.000.000	60.000.000	132.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	127.150.000
2	Kacaribu	24.000.000	18.000.000	24.000.000	48.000.000	138.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	8.400.000	63.600.000	133.336.000
3	Kandibata	24.000.000	18.000.000	24.000.000	60.000.000	150.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	150.781.000
4	Ketaren	24.000.000	-	24.000.000	204.000.000	204.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	49.200.000	228.955.000
5	Lau Simomo	24.000.000	18.000.000	24.000.000	48.000.000	138.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	142.140.000
6	Rumah Kabanjahae	24.000.000	-	24.000.000	60.000.000	132.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	142.140.000
7	Samura	24.000.000	18.000.000	24.000.000	72.000.000	162.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	92.400.000	57.600.000	202.480.000
8	Sumber Mutakat	24.000.000	18.000.000	24.000.000	108.000.000	198.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	187.616.000
		192.000.000	90.000.000	192.000.000	588.000.000	1.254.000.000	115.200.000	96.000.000	67.200.000	288.000.000	566.400.000	1.285.669.000
												3.106.069.000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD				ADD	TOTAL DANA
		KADES	SEKDES (NON PNS)	KAUR (SESUAI TIPE DESA)	KASI (SESUAI TIPE DESA)	JUMLAH	KETUA	WAKIL	SEKRETARIS	ANGGOTA		
1	Doulu	24.000.000	18.000.000	36.000.000	48.000.000	162.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	8.400.000	153.075.000
2	Gurusinga	24.000.000	-	36.000.000	84.000.000	180.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	195.200.000
3	Lau Guntha	24.000.000	18.000.000	24.000.000	48.000.000	138.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	92.400.000	120.889.000
4	Rayaa	24.000.000	-	36.000.000	84.000.000	180.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	207.311.000
5	Rumah Berastagi	24.000.000	-	36.000.000	144.000.000	240.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	269.123.000
6	Sempajaya	24.000.000	36.000.000	204.000.000	516.000.000	1.104.000.000	86.400.000	72.000.000	50.400.000	288.000.000	496.800.000	1.174.961.000
		144.000.000	90.000.000	192.000.000	588.000.000	1.254.000.000	115.200.000	96.000.000	67.200.000	288.000.000	566.400.000	1.285.669.000
												3.106.069.000

III. KECAMATAN ...

✓
C

III. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD				ADD	TOTAL DANA
		KADES (NON PNS)	SEKDES (SESUAI TIPE DESA)	KAUR (SESUAI TIPE DESA)	KASI (SESUAI TIPE DESA)	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRE - TARIS		
1	Ajibuhara	24.000.000	-	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	121.688.000
2	Ajiahe	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	63.600.000	256.989.000
3	Ajijulu	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	177.270.000
4	Ajimbelaung	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	114.453.000
5	Bertah	24.000.000	-	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	92.400.000	184.065.000
6	Bunuraya	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	133.760.000
7	Kacinambun	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	128.800.000
8	Kubu Simbelang	24.000.000	18.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	151.779.000
9	Kuta Bale	24.000.000	-	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	112.928.000
10	Kuta Kepar	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	119.483.000
11	Kutajulu	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	120.211.000
12	Kutambelin	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	128.363.000
13	Lambar	24.000.000	18.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	228.213.000
14	Lau Rimau	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	252.128.000
15	Lepar Samura	24.000.000	-	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	258.683.000
16	Manuk Mulia	24.000.000	-	36.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	259.411.000
17	Mulawari	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	320.363.000
18	Sait	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	255.432.000
19	Seberaya	24.000.000	-	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	116.232.000
20	Singga	24.000.000	-	24.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	136.232.000
21	Sulka	24.000.000	-	36.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	137.581.000
22	Suka Mbayak	24.000.000	18.000.000	24.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	138.871.000
23	Suka Sipilihen	24.000.000	18.000.000	36.000.000	-	120.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	140.753.000
24	Sukadame	24.000.000	-	24.000.000	-	108.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	129.968.000
25	Sukamaju	24.000.000	-	24.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	130.863.000
26	Tigapanah	24.000.000	18.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	50.400.000	134.801.000
		624.000.000	288.000.000	696.000.000	180.000.000	374.400.000	2.484.000.000	312.000.000	218.400.000	741.600.000	4.085.218.000

IV. KECAMATAN ...

N

CY

VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPJD					ADD	TOTAL DANA	
		KADES (NON PNS)	SEKDES (SESUAI TIPE DESA)	KAUR (SESUAI TIPE DESA)	KASI (SESUAI TIPE DESA)	Kepala Desaun	JUMLAH	KETUA	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRE - TARIS			
1	Batu Mamak	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	120.092.000	
2	Bekilang	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	135.144.000	
3	Buluh Pancur	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	128.998.000	
4	Cungung Juhar	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	129.877.000	
5	Jandi	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	131.560.000	
6	Juhar Ginting	24.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	133.646.000	
7	Juhar Ginting Sadanioga	24.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	134.494.000	
8	Juhar Perangan-angin	24.000.000	-	36.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	136.554.000	
9	Juhar Tarigan	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	136.554.000	
10	Keraihan	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	136.554.000	
11	Ketawaren	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	136.554.000	
12	Kidupen	24.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
13	Kutaeugung	24.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
14	Kutambelin	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
15	Lau Kidupen	24.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
16	Lau Lingga	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
17	Mbetung	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
18	Naga	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
19	Naegeri	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
20	Nanosuro	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
21	Pasar Baru	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
22	Pernantin	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
23	Sigenderang	24.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
24	Sugihen	24.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	137.307.000	
25	Sukrabobo	600.000.000	108.000.000	876.000.000	876.000.000	-	2.460.000.000	360.000.000	300.000.000	210.000.000	360.000.000	460.800.000	1.330.800.000	7.123.015.000

XIV. KECAMATAN MERDEKA

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPJD			ADD	TOTAL DANA	
		KADES (NON PNS)	SEKDES (NON PNS)	KAUR (SESUAI TIPE DESA)	KASI (SESUAI TIPE DESA)	JUMLAH	Kepala Dusun	KETUA	WAKIL SEKRE - TARIS	ANGGOTA			
1	Cinta Rayat	24.000.000	18.000.000	24.000.000	60.000.000	150.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	165.044.000	407.444.000
2	Deram	24.000.000	18.000.000	36.000.000	24.000.000	138.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	112.048.000	299.248.000
3	Gongsol	-	24.000.000	24.000.000	48.000.000	120.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	85.200.000	50.400.000	155.432.000	404.809.000
4	Jaranguda	24.000.000	18.000.000	36.000.000	48.000.000	162.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	63.600.000	143.775.000	345.375.000	345.375.000
5	Merdeka	24.000.000	18.000.000	24.000.000	48.000.000	138.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	63.600.000	137.892.000	339.492.000	339.492.000
6	Sada Peratih	24.000.000	18.000.000	24.000.000	48.000.000	138.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	63.600.000	122.488.000	348.088.000	348.088.000
7	Semangat	24.000.000	18.000.000	36.000.000	48.000.000	162.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	8.400.000	296.539.000	296.539.000
8	Semanget Gunung	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	14.400.000	126.489.000	289.689.000
9	Ujung Teran	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	14.400.000	126.489.000	3.133.316.000
		216.000.000	144.000.000	252.000.000	252.000.000	372.000.000	1.236.000.000	129.600.000	108.000.000	75.600.000	295.200.000	608.400.000	1.288.916.000

XV. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPJD			ADD	TOTAL DANA		
		KADES (NON PNS)	SEKDES (NON PNS)	KAUR (SESUAI TIPE DESA)	KASI (SESUAI TIPE DESA)	JUMLAH	Kepala Dusun	JUMLAH	KETUA	WAKIL SEKRE - TARIS	ANGGOTA			
1	Beberah	24.000.000	-	36.000.000	12.000.000	108.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	14.400.000	49.200.000	183.060.000	
2	Gung Pinto	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	14.400.000	49.200.000	156.615.000	
3	Kehayaken	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	102.000.000	102.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	128.888.000	
4	Kuta Tonggal	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	14.400.000	14.400.000	143.813.000
5	Kutagugung	24.000.000	18.000.000	36.000.000	24.000.000	138.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	14.400.000	49.200.000	319.940.000	
6	Kutambelin	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	132.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	14.400.000	49.200.000	179.199.000	
7	Kutarayat	24.000.000	18.000.000	24.000.000	48.000.000	138.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	14.400.000	49.200.000	265.771.000	
8	Naman	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	24.000.000	8.400.000	28.800.000	146.744.000	
9	Ndeskati	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	126.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	14.400.000	49.200.000	159.921.000	
10	Sigarang-garang	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	102.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	14.400.000	49.200.000	115.921.000	
11	Simacem	24.000.000	18.000.000	24.000.000	36.000.000	126.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	49.200.000	14.400.000	49.200.000	132.555.000	
12	Sukanalu	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	96.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	12.000.000	14.400.000	49.200.000	123.528.000	
13	Sukandebi	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	114.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	14.400.000	49.200.000	141.804.000	
14	Sukatepu	336.000.000	126.000.000	360.000.000	360.000.000	1.554.000.000	372.000.000	360.000.000	201.600.000	168.000.000	117.600.000	789.600.000	2.058.664.000	

XVI. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD				TOTAL DANA
		KADES	SEKDES (NON PNS)	KAUR (SESUAI TIPE DESA)	KASI (SESUAI TIPE DESA)	JUMLAH	KETUA	WAKIL	SEKRE - TARIS	
1	Gunung Merlawan	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	106.038.000
2	Jandinerah	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	8.400.000	111.188.000
3	Kutagaluh	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	111.797.000
4	Kutakepar	24.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	8.400.000	169.707.000
5	Kutambaru	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	139.465.000
6	Mardinding	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	140.907.000
7	Nariguning I	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	141.390.000
8	Nariguning II	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	141.880.000
9	Penampen	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	142.370.000
10	Perbaiji	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	142.860.000
11	Sukatendel	24.000.000	-	18.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	143.400.000
12	Susik	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	143.880.000
13	Tanjung Mbelang	24.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	144.460.000
14	Tanjung Merawa	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	144.940.000
15	Tanjung Pulo	24.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	-	114.000.000	14.400.000	12.000.000	145.420.000
16	Temburun	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	8.400.000	145.890.000
17	Tiganderket	408.000.000	108.000.000	456.000.000	456.000.000	-	1.428.000.000	244.800.000	204.000.000	1.260.000.000
										3.16.330.000
										4.638.330.000
										894.000.000
										2.316.330.000
										4.638.330.000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD				TOTAL DANA
		KADES	SEKDES (NON PNS)	KAUR (SESUAI TIPE DESA)	KASI (SESUAI TIPE DESA)	JUMLAH	KETUA	WAKIL	SEKRE - TARIS	
1	Bintang Meriah	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
2	Buh Raya	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
3	Gunung Meriah	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
4	Jinabun	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
5	Kura Male	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
6	Kurabuluh	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
7	Kutabuluh Gugung	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
8	Lau Buluh	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
9	Liang Merdeka	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
10	Mburidi	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
11	Negeriae	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
12	Pola Tebu	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
13	Rih Tengah	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
14	Siebang-abang	24.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	-	90.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
15	Tanjung Merah	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
16	Ujung Deleng	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000
		384.000.000	108.000.000	384.000.000	384.000.000	-	1.260.000.000	230.400.000	192.000.000	345.600.000
										902.400.000
										3.16.330.000
										4.638.330.000

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

XVI. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	BAGI HASIL
1	GUNUNG MERLAWAN	12.385.000
2	JANDI MERIAH	13.002.000
3	KUTA GALUH	12.940.000
4	KUTA KEVAR	13.864.000
5	KUTAMBARU	12.552.000
6	MARDINGDING	13.714.000
7	NARIGUNUNG I	12.460.000
8	NARIGUNUNG II	12.731.000
9	PENAMPEN	13.217.000
10	PERBAJI	12.400.000
11	SUKATENDEL	12.499.000
12	SUSUK	12.600.000
13	TANJUNG MBELANG	13.063.000
14	TANJUNG MERAWA	12.787.000
15	TANJUNG PULO	12.519.000
16	TEMBURUN	12.631.000
17	TIGANDERKET	13.705.000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BINTANG MERIAH	12.947.000
2	BUAHRAYA	12.712.000
3	GUNUNG MERIAH	12.887.000
4	JINABUN	12.750.000
5	KUTABULUH	12.592.000
6	KUTABULUH GUGUNG	13.180.000
7	KUTAMALE	12.678.000
8	LAUBULUH	12.685.000
9	LIANG MERDEKA	12.500.000
10	MBURIDI	12.686.000
11	NEGERIJAHE	12.674.000
12	POLATEBU	12.682.000
13	RIHTENGGAH	12.562.000
14	SIABANG-ABANG	12.548.000
15	TANJUNG MERAHE	12.724.000
16	UJUNG DELENG	12.757.000

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA